

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan

30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Persyaratan

1. 1. Telah dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
2. 2. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana
3. 3. Berkelakuan baik dalam kurun waktu 9 bulan terakhir
4. 4. bagi narapidana tindak pidana korupsi harus telah membayar lunas denda dan uang pengganti
5. 5. Bagi Narapidanan terorisme harus menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
6. 6. Kesetiaan kepada NKRI secara tertulis bagi narapidana warga negara indonesia
7. 7. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana warga negara asing
8. 8. Surat keterangan telah mengikuti program deradikalasi dari kepala lapas dan atau kepala badan nasional penanggulangan terorisme
9. 9. Salinan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
10. 10. Laporan perkembangan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang di buat oleh wali pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment keutuhan yang dilakukan oleh assessor
11. 11. surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian cuti bersyarat terhadap narapidana
12. 12. Salinan register F dari kepala Lapas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang

Jl. Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan

30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

1. 1. Wali pemasyarakatan mengajukan permohonan pemberian CB kepada Kepala Lapas
2. 2. TPP melaksanakan sidang di Kanwil atau kantor pusat
3. 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada direktur jenderal pemasyarakatan
5. 5. TPP pusat melaksanakan sidang TPP
6. 6. Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas nama menteri menetapkan pemberian CB, berdasarkan rekomendasi hasil sidang TPP Pusat
7. 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

58 Hari

1. Untuk di Lapas maks 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke kanwil atau ditolak.
2. Untuk di Kanwil maks 14 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan diteruskan ke Ditjen PAS atau ditolak
3. Untuk di Ditjen PAS maks 30 hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan sudah disidang TPP, pengusulan sudah diputuskan untuk disetujui atau ditolak

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang

Jl.Merdeka No.12 Palembang, 19 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan

30113 30113 0711350644

lpppalembang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga
Apabila ada pengaduan akan segera ditindaklajuti dengan pengumpulan bukti-bukti dan diproses sesuai
SOP. Data pelapor akan dihantarkan.

Pengaduan dapat datang langsung ke Lapas Perempuan ke ruang pengaduan, atau melalui nomor
pengaduan : 081367258268 (Telp/WA)

